

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA DI KECAMATAN LUBUK RAJA

Anis Feblin¹, Chefi Rizky Djuliar²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi& Bisnis, Universitas Baturaja

¹feblinfathullah@gmail.com

Abstarct

Making village fund financial reports using the manual system often makes mistakes and mismatches of the results of the details of these funds, using the manual system requires accumulation of paper and a lot of waste of village budgets in Lubuk Raja District. Therefore, the central government and the BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) made a regulation that the ten villages in Lubuk Raja District had to apply the village financial system application for the production of village financial reports. The research objective was to determine the application of village financial system applications in improving the performance of village officials in Lubuk Raja District. The method used in this research is descriptive comparative with qualitative analysis, the research uses primary data sources with research techniques such as interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the village financial system in terms of quality, quality, responsibility, cooperation, and initiative was in a fairly good category so that seen from the performance of the village apparatus it had increased. The application of the village financial system application in village financial management is more transparent and accountable, so that better governance is created.

Keywords: *Implementation of SISKEUDES Application, Village Apparatus Performance*


Abstrak

Pembuatan laporan keuangan dana desa dengan sistem manual sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian hasil rincian dana tersebut, menggunakan sistem manual membutuhkan penumpukan kertas dan banyak pemborosan anggaran desa di Kecamatan Lubuk Raja. Oleh karena itu pemerintah pusat dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) membuat peraturan bahwa kesepuluh desa di Kecamatan Lubuk Raja harus menerapkan aplikasi sistem keuangan desa untuk pembuatan laporan keuangan desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan analisis kualitatif, penelitian menggunakan sumber data primer dengan teknik penelitian seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa ditinjau dari kualitas, kualitas, tanggung jawab, kerjasama, dan inisiatif memiliki kategori cukup baik sehingga dilihat dari kinerja aparatur desa mengalami peningkatan. Penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa lebih transparan dan akuntabel, sehingga tercipta tata pemerintahan yang lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi Aplikasi SISKEUDES, Kinerja Aparatur Desa

PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang



memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Desadiberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, pada pasal 72 dibunyikan bahwa desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan bantuanKeuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang di dasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi gambaran kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa.Pengelolaan Dana Desa sejauh ini masih termasuk lambat, hal ini disebabkan oleh laporan keuangan desa belum dilaksanakan dengan baik, dan secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan karena kurangnya *skill* dan pemahaman terkait teknologi informasi (internet) aparatur desa dalam mengelola anggaran dana desa, sehingga menyebabkan tindakan-tindakan yang menyimpang yang merugikan dan menghambat kemajuan desa itu sendiri (Hanifah dan Praptoyo, 2015).

Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan sebagai media dalam pengelolaan laporan keuangan desa dan kekayaan desa, serta untuk memperbaiki laporan keuangan agar sesuai dengan mutu dan ketepatan dari laporan keuangan itu sendiri. Pemerintah pusat bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).Diterapkannya sistem ini di Kecamatan Lubuk Raja diharapkan dapat membantu kerja dari aparatur desa sehingga semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif.Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja.Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan sitem tersebut dalam meningkatkan kinerja aparatur desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah SISKEUDES

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala *supply* listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBD desa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

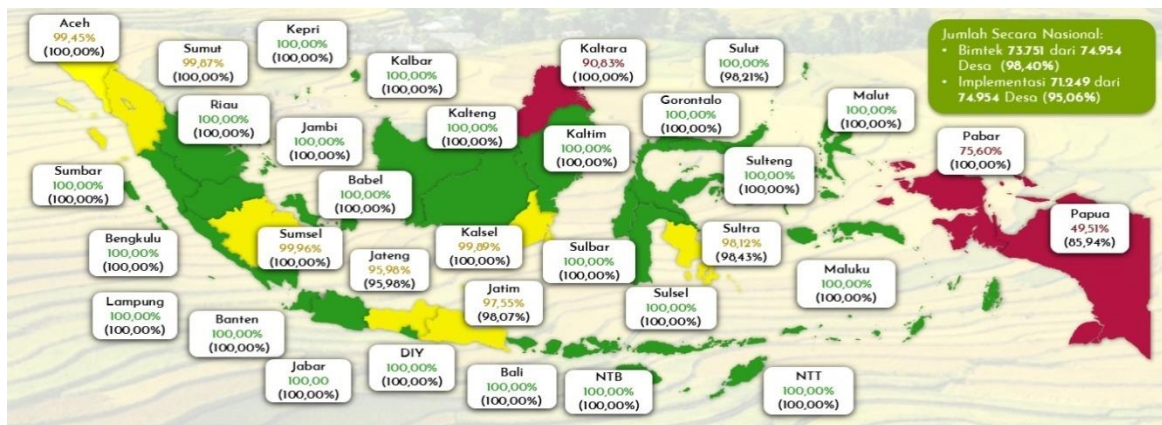
Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>)

Aplikasi SISKEUDES

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam kedua sistem tersebut dibuat sederhana dan *user friendly* untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIMDA Desa dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.

Dokumen penatausahaan antara lain: Bukti Penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP) dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan laporan-laporan berupa: Laporan Penganggaran (APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana) dan Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register dokumen penatausahaan). Aplikasi SISKEUDES sesuai regulasi yang berlaku untuk memudahkan tatakelola keuangan desa, mudah digunakan dan dilengkapi dengan sistem pengendalian intern dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi SISKEUDES telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Infografis implementasi Siskeudes sebagai berikut:




Sumber: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>

Gambar 1

Kinerja

Menurut Mahsun (2013:25) kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu



organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2010:94) kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas pengalaman dan keunggulan serta waktu.

Tingkat keberhasilan pegawai dalam mengemban tugasnya disebut dengan istilah *level of performance* atau level kinerja. Pegawai yang memiliki level kinerja tinggi merupakan pegawai yang produktivitas kerjanya tinggi. Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas penting untuk mengetahui level kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai sendiri mengacu pada sistem formal dan terstruktur, yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mengetahui sifat-sifatnya yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab.

Mangkunegara (2013:75) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kinerja aparatur desa, yaitu :

1. Kualitas

Menunjukkan kerapihan, keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan/organisasi.

2. Kuantitas

Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisien dan efektif dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi.

3. Tanggung jawab

Menunjukkan seberapa besar pegawai dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari.

4. Kerjasama

Kesediaan pegawai untuk berpartisipasi dengan pegawai yang lain secara vertikal dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.

5. Inisiatif

Inisiatif dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau menunukan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah kewajiban seorang pegawai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Menurut Moleong (20014:86) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Raja yang terdapat tujuh desa dengan tujuan untuk melihat apakah penerapan aplikasi sistem keuangan desaini mampu untuk meningkatkan kinerja aparatur desa

Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi yang di dapat dari informasi pihak-pihak yang terkait. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 35 orang dengan metode *purposive sampling* yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata umum dan usaha, dan operator di tujuh desa dalam Kecamatan Lubuk Raja.

Tabel 1. Informa Penelitian di Kecamatan Lubuk Raja

Jabatan	Jumlah
Kepala Desa	7 orang
Sekretaris Desa	7 orang
Kaur Keuangan	7 orang
Kaur Tata Umum & Usaha	7 orang
Operator Siskeudes	7 orang
Jumlah Informan	35 Orang

Sumber : Data Kecamatan , 2020

Uji keabsahan data dan teknik pengolahan data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Setelah pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka dilakukan pengolahan data dengan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. *Editing*, merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan.
2. *Coding* (Pengkodean), mengklafikasikan data-data melalui tahap *coding* dimana data-data yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.
3. Tabulasi, merupakan tahap pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.

4. Interpretasi data, tahapan ini peneliti memberikan penafsiran atau penjabaran dari tabel atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperlukan dengan data lain. (Singaribun, 2006 : 24)

Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif. Menurut Sugiyono (2014:54) Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Proses analisis data meliputi *data reduction, conclusion drawing/verification, dan data display*. Pada penelitian ini menggunakan penyajian data persentase dan tabel, dan menggunakan indikator kinerja oleh Mangkunegara (2013:75) yaitu kualitas, kuantitas, tanggung jawab, Kerjasama, dan inisiatif.

Rumus Persentase:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Analisis Deskriptif Presentase

No	Presentase	Kriteria
1.	76% - 100%	Baik
2.	56% - 76%	Cukup Baik
3.	40% - 56%	Kurang Baik
4.	1% - 40%	Tidak Baik

Sumber : Riduwan, 2004

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Lubuk Raja

1. Kualitas Kinerja

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 35 orang aparatur desa (responden) yang memiliki kualitas kinerja baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk dalam penerapan aplikasi SISKEUDES dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

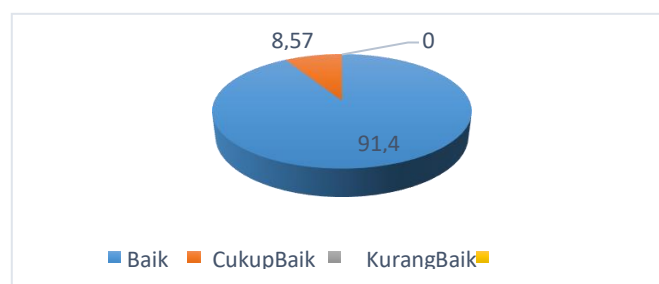
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kualitas Kinerja Aparatur Desa dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Lubuk Raja

Kualitas Kinerja	Frekuensi	Persentase
Baik	32	91,43
Cukup baik	3	8,57
Kurang baik	0	0

TidakBaik	0	0
Jumlah	35	100

Sumber:DataPrimer2021

Hasil dari penelitian yang dilakukan terkait dengan kualitas kinerja aparatur desa dalam penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Lubuk Raja diketahui bahwa dari 35 responden terdapat 32 orang aparatur desa (91,43%) memiliki kualitas kerja yang baik, dan 3 orang aparatur desa (8,57%) memiliki kualitas kerja yang cukup baik.



Gambar 2 Kualitas Kinerja

Hasil kualitas kinerja aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja memiliki kategori cukup baik dengan nilai persentase sebesar 91,43% dengan telah diterapkannya aplikasi SISKEUDES tetapi pada saat terjadi pergantian kepengurusan aparatur desa masih ada beberapa kaur keuangan yang belum menguasai aplikasi dan perlu diadakan pelatihan lanjutan untuk aparatur desa.

2. Kuantitas Kinerja

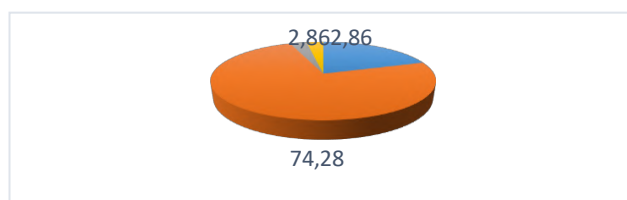
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 responden yang memiliki kuantitas kinerja baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk dalam penerapan aplikasi SISKEUDES dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kuantitas Kinerja Aparatur Desa dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Lubuk Raja

KuanlitasKinerja	Frekuensi	Persentase
Baik	7	20
Cukupbaik	26	74,28
Kurangbaik	1	2,86
TidakBaik	1	2,86
Jumlah	35	100

Sumber:DataPrimer2021

hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kuantitas kinerja aparatur desa dalam penerapan Aplikasi SISKEUDES bahwa dari 35 responden terdapat 7 aparatur desa (20%) yang memiliki kuantitas kinerja yang baik, 26 aparatur desa (74,28%) memiliki kuantitas kinerja yang cukup baik, 1 aparatur desa (2,86%) yang kurang baik, dan 1 aparatur desa (2,86%) yang tidak baik.



Gambar 3. Kuantitas kinerja

Berdasarkan jawaban dari 35 responden didapatkan kuantitas kinerja aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja memiliki kategori cukup baik dengan nilai persentase sebesar 74,28% karena dengan diterapkannya aplikasi SISKEUDES dapat membantu pencapaian target dan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Kaurkeuangan.

3. Tanggung Jawab Kinerja

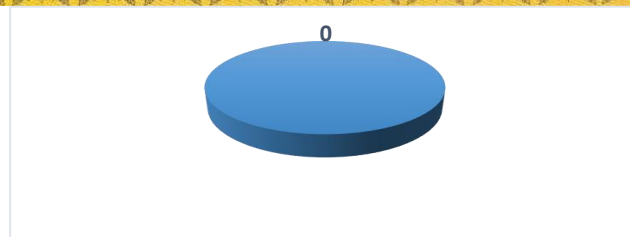
Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 35 responden yang memiliki tanggung jawab aparatur desa baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk dalam penerapan aplikasi SISKEUDES dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggung Jawab Aparatur Desa dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Lubuk Raja

Tanggung jawab Kinerja	Frekuensi	Persentase
Baik	35	100
Cukupbaik	0	0
Kurangbaik	0	0
TidakBaik	0	0
Jumlah	35	100

Sumber: DataPrimer2021

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tanggung jawab aparatur desa dalam penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Lubuk Raja diketahui bahwa dari 35 orang responden, 35 aparatur desa (100%) memiliki tanggung jawab yang baik dalam menjalankan tugasnya.



Gambar 4
Tanggung Jawab Kinerja

Hasil untuk poin tanggung jawab didapatkan bahwa hasil tanggung jawab kinerja aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja memiliki kategori baik dengan nilai persentase sebesar 100%. Dengan diterapkannya aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik untuk terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga terwujudnya tata Kelola yang baik (*good governance*)

4. Kerja Sama

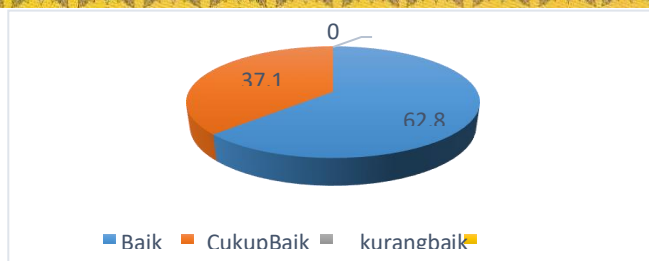
Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 35 responden yang memiliki Kerjasama aparatur desa baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk dalam penerapan aplikasi SISKEUDES dapat dilihat dalam tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Kerja sama Aparatur Desa dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Lubuk Raja

Kerjasama Kinerja	Frekuensi	Persentase
Baik	22	62,86
Cukup baik	13	37,14
Kurang baik	0	0
Tidak Baik	0	0
Jumlah	35	100

Sumber: Data Primer 2021

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kerja sama aparatur desa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES diketahui bahwa 35 orang responden terdapat 22 aparatur desa (62,86 %) memiliki kerja sama yang baik, dan 13 aparatur desa (37,14 %) memiliki kerja sama yang cukup baik dengan semua aparatur desa.



Gambar 5
Kerja sama Kinerja

Berdasarkan jawaban responden didapatkan hasil kerja sama aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja memiliki katagori baik dengan nilai persentase sebesar 62,86% dengan diterapkannya Aplikasi SISKEUDES sangat membantu dalam meningkatkan kerja sama aparatur desa dalam mengoperasikan sistem keuangan desa dan kualitas sumber daya manusia sangat diperhatikan karena dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan

5. Inisiatif

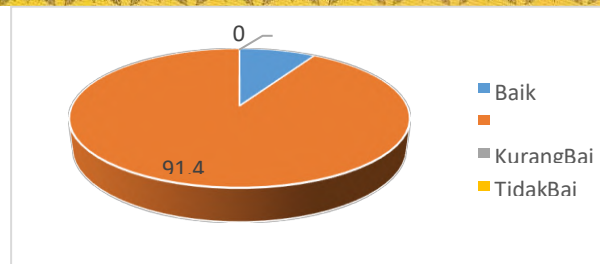
Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 35 orang aparatur desa (responden) yang memiliki inisiatif kerja baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk dalam penerapan aplikasi SISKEUDES dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7. Distribusi frekuensi Inisiatif Kerja Aparatur Desa dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Lubuk Raja

InisiatifKinerja	Frekuensi	Persentase
Baik	3	8,57
Cukupbaik	32	91,43
Kurangbaik	0	0
TidakBaik	0	0
Jumlah	35	100

Sumber: Data Primer 2021

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan inisiatif aparaturdesa dalam penerapan Aplikasi SISKEUDES diketahui bahwa dari 35 orang responden terdapat 3 aparatur desa (8,57%) memiliki inisiatif kerja yang biakdan 32 aparatur desa (91,43%) memiliki inisiatif kerja yang cukup baik dalam bekerja tanpa menunggu perintah dari atasan.



Gambar 6
Inisiatif Kinerja Aparatur Desa

Untuk poin inisiatif, jawaban responden didapatkan hasil inisiatif aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja memiliki kategori cukup baik dengan nilai persentase sebesar 91,43% dari penerapan aplikasi SISKEUDES yang masih terbilang rumit dan sering terjadi kendala-kendala sehingga dapat menghambat pekerjaan, tetapi para aparatur desa sering melakukan koordinasi pegawai agar dapat memaksimalkan pekerjaan sehingga mampu mengatasi masalah yang sering terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kualitas kerja aparatur desa mempunyai kategori baik dan cukup baik, karena baruterjadinya pergantian kepengurusan aparatur desa sehingga beberapa kaur keuangan dan operator di Kecamatan Lubuk Raja masih belum menguasai Aplikasi SISKEUDES, hal ini disebabkan karena belum adanya pelatihan lanjutan untuk aparatur desa dalam mengimplementasikan Aplikasi SISKEUDES.
2. Kuantitas dapat dilihat dari hasil kerja, dari penerapan aplikasi SISKEUDES membantu pencapaian target kinerja dan sangat membantu dalam pelaporan keuangan yang dilakukan langsung oleh kaur keuangan ke Kabupaten.
3. Tanggung jawab aparatur desa sangat baik, karena dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata Kelola yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Kerjasama antara aparatur desa di Kecamatan Lubuk Raja memiliki kategori baik. Karena dalam penerapan Aplikasi SISKEUDES Kerjasama dan kualitas sumber daya manusia harus sangat di perhatikan karena dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

5. Inisiatif aparatur desa sudah baik, dimana kendala-kendala yang dapat menghambat kerja para aparatur desa dapat diatasi dan para aparatur desa berusaha untuk melakukan koordinasi pegawai agar dapat memaksimalkan pekerjaan.

Saran

1. Pemerintah daerah dan BPKP sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan atau *skill* operator dengan pelatihan dan bimbingan teknis langsung pada prakteknya bukan hanya sekedar pada penyampaian informasi. Pelatihan yang diselenggarakan juga tidak hanya sekali dalam setahun.
2. Aparatur desa harus mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem tersebut sehingga pegawai desa dapat lebih mudah saat bekerja. Serta memberikan pelatihan tambahan bagipara pegawai yang tidak mengikuti pelatihan agar semua pegawai mengetahui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) lebih banyak sehingga mampu menggunakan aplikasi tersebut dengan baik serta mencapai tujuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dan Samad. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Kepala Desa. *Jurnal Indonesian Journal on Information System*. ISSN Print: 2648-6438, ISSN Online: 2548-6438 No. 1 Vol. 4 (researchgate.net diakses 15 Oktober 2020)
- Hanifah, dan, Praptoyo. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal ilmu & Riset Akuntansi*. No. 8 Vol. 4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIE) Surabaya. (ejournal.umri.ac.id diakses 15 Oktober 2020)
- Hasibuan. (2010). *manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara (<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>)
- Mahsun, Mohamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :BPFE-Yogyakarta
- Mangkuegara.2013. *Manajemen Sumber Daya Manuasia Perusahaan*.PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja.Rosda Karya.
- Riduwan. (2004). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*.Bandung:Alfabeta
- Singaribun. (2006). *Metode penelitian survey*. LP3ES. Jakarta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa